

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Yayasan merupakan badan hukum yang orientasi aktivitasnya bergerak pada ranah sosial, keagamaan maupun kemanusiaan, yayasan memperoleh sumber pendanaan dari pemisahan kekayaan, dan dari pemberi sumber dana (donatur) yang tidak mengharapkan timbal balik secara ekonomi terhadap sumber dana tersebut (Isnanto, 2020). Dewasa ini Yayasan untuk dapat bertahan harus memiliki strategi dalam menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan dunia usaha, yayasan juga diharapkan mampu secara mandiri memperoleh sumber pendanaan untuk mencapai maksud dan tujuannya, sehingga tidak bergantung dari sumbangan donatur yang menjadi modal utama dalam operasional yayasan (Rinaldiansyah, 2017). Dalam mewujudkan prinsip kemandirian pada lembaga sosial khususnya yayasan adalah dengan mendirikan unit *entrepreneurs*, atau dapat diartikan sebagai yayasan yang membentuk unit usaha (Setiowati, 2016).

Sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian yayasan dengan cara mendirikan suatu badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Sebagai organisasi nonlaba, yayasan seharusnya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada laba, sebab dikhawatirkan

akan adanya kesempatan untuk menyalahgunakan lembaga yayasan (Brahmantya, 2020). Badan sosial seperti yayasan jika melakukan kegiatan usaha tujuannya bukan untuk mencari laba, melainkan melaksanakan sesuatu yang bersifat amal walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa yayasan secara tidak langsung memperoleh laba (Wulandari, 2019).

Penyalahgunaan lembaga yayasan masih terjadi di Indonesia, seperti yang dilansir dari pemberitaan media online Antaranews.com dimana terjadi kasus penipuan berkedok yayasan yang merugikan masyarakat hingga milyaran rupiah yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Anak Bangsa, Josefa J. Kelbulan bersama sekretarisnya Lambert W. Miru, sebelumnya Yayasan Anak Bangsa ini telah terdaftar di kemenkumham dan mendapat status legal di tahun 2020 (Iskandar, 2021). Di samping itu melalui kanal Youtube (Koreri Trans Media, 2020) Gubernur Murad Ismail atas nama Pemerintah Daerah Maluku mengapresiasi dan menyambut baik kehadiran Yayasan Anak Bangsa 11 Provinsi Indonesia Timur itu serta dalam beberapa tayangan di kanal Youtube (Koreri Trans Media, 2021) nampak pelaksanaan kegiatan sosial memang dilakukan oleh Yayasan Anak Bangsa seperti membantu dalam pembangunan Masjid Buano Utara. Namun sangat disayangkan kepercayaan dari masyarakat malah dijadikan kesempatan untuk menyalahgunakan lembaga yayasan dimana yayasan ini menjalankan bisnis terselubung dengan modus penipuan pengadaan uang.

Penyimpangan dalam menjalankan lembaga sosial seperti yayasan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab mengatasnamakan yayasan untuk kepentingan pribadinya menjadikan tingkat kepercayaan masyarakat semakin berkurang. Untuk menjaga tingkat kepercayaan lembaga sosial seperti yayasan

diperlukan pertanggungjawaban dari pihak pengelola yayasan, baik pertanggungjawaban yang bersifat vertikal maupun horizontal, dimana secara vertikal yayasan bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi (pembina) dalam hal pengelolaan dana dan manajemen yayasan, secara horizontal yayasan harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan mampu berdampak baik di lingkungan masyarakat dan menepis persepsi buruk terkait yayasan yang mencari keuntungan (Irwansyah, 2016).

Akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur guna memberikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu program yang melibatkan masyarakat (Aziiz, 2019). Pentingnya akuntabilitas dalam organisasi nonlaba juga disampaikan dalam penelitian (Paranoan, 2018) bahwasannya dana-dana dalam organisasi nonlaba berasal dari para pemberi amanah dalam hal ini donatur maupun masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pengelolaan dan penggunaannya. Laporan pertanggungjawaban tidak bisa hanya dijadikan tolak ukur akuntabilitas, namun kemudahan mengakses informasi baik secara langsung maupun tidak, terlaksananya program yang tepat sasaran, hingga kebijakan pada organisasi yang bersangkutan turut menjadi pertimbangan dalam menilai akuntabilitas (Saputri, 2020).

Menurut Mardiasmo (2018), organisasi nonlaba memiliki tuntutan akuntabilitas yang tidak jauh berbeda dengan organisasi laba, sebagaimana dalam organisasi laba, organisasi nonlaba dituntut untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan segala aktivitas guna membangun kepercayaan publik. Penyajian laporan keuangan berorientasi nonlaba sebagaimana dalam Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (ISAK 35) meliputi laporan posisi keuangan, laporan

penghasilan komprehensif, laporan perubahan asset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, pengguna laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba umumnya memiliki kepentingan untuk menilai: (a) cara manajemen melaksanakan tanggung jawab atau penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, serta (b) informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomik.

Salah satu yayasan yang bergerak dari sisi kemanusiaan, dan mempunyai visi mulia untuk menjadi layanan sosial khususnya di Kabupaten Buleleng dan berfokus pada perawatan luka serta penyandang difabel adalah Yayasan Kaki Kita Sukasada. Yayasan Kaki Kita Sukasada dalam pengelolannya menjalankan konsep *social entrepreneurship*. Konsep *social entrepreneurship* pada pengelolaan Yayasan Kaki Kita Sukasada mengindikasikan bahwasannya yayasan tidak hanya sebagai lembaga sosial namun juga membentuk unit usaha untuk pendanaan kegiatan sosialnya, dimana *Social entrepreneurship* merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan penciptaan nilai sosial di masyarakat. Tujuan dari *social entrepreneurship* bukan mencari keuntungan semata, melainkan yang utama membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan sosial (Setiowati, 2016).

Beranjak dari masalah sosial untuk membantu penderita diabetes yang kurang mampu dari segi *financial* serta memberdayakan penyandang disabilitas, Yayasan Kaki Kita Sukasada membentuk unit usaha dengan memperhatikan terhadap masalah lingkungan dan kelestariannya. Dimana produk yang dibuat oleh yayasan ini berupa produk *recycle* sampah plastik menjadi produk rumah tangga yang bernilai ekonomi, serta dalam proses produksinya tidak menimbulkan pencemaran udara maupun menimbulkan sampah baru sehingga produk yang

dihasilkan oleh unit usaha yayasan ini merupakan produk yang ramah lingkungan. Adanya *social entrepreneurship* seperti Yayasan Kaki Kita Sukasada yang dapat menerima dan memberdayakan disabilitas diharapkan dapat menumbuhkan ke-mandirian disabilitas dalam hal peningkatan *financial*, dan perlahan dapat membantu mengurangi pengangguran dikalangan disabilitas. Yayasan Kaki Kita Sukasada saat ini telah memperkerjakan seorang penyandang disabilitas, dan beberapa juga dilibatkan dalam unit usaha yayasan namun diberikan upah secara borongan, selain itu yayasan juga pernah menerima magang siswa SLB.

Berbeda dengan unit usaha konvensional yang menggunakan laba sebagai tolak ukur keberhasilan perusahaan, laba pada unit usaha Yayasan Kaki Kita Sukasada sepenuhnya digunakan untuk menjalankan 3 program yayasan, seperti yang disampaikan oleh Bapak I Made Aditiasthana selaku Ketua Yayasan Kaki Kita Sukasada:

“...harapan kedepan semoga produk *recycle* sampah plastik kami dapat dipasarkan dengan luas, sehingga secara tidak langsung melalui produk kami selain dapat menjaga lingkungan juga ikut berdonasi pada Yayasan, karena ini Badan Usaha Yayasan, seluruh keuntungan (*profit*) pengolahan sampah plastik ini adalah untuk menjalankan 3 program yayasan”.

Lembaga sosial seperti yayasan yang berupaya mandiri dengan membentuk unit usaha tidak jarang mengalami permasalahan dalam pengelolaannya, terlebih ada rangkap jabatan dimana pengurus yayasan juga terlibat dalam unit usaha yayasan sehingga ada beban kerja berlebih dalam pengelolaan yayasan, maka disinilah pengurus yayasan dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan yayasan agar jangan sampai dengan membentuk unit usaha, pengurus lalai terhadap tujuan utama didirikannya yayasan itu sendiri.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena berdasarkan wawancara dan observasi awal yang telah peneliti lakukan di lapangan, ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi di Yayasan Kaki Kita Sukasada, dimana dalam pembukuan yayasan pengurus tidak melakukan pencatatan terhadap pemasukan dan pengeluaran yayasan secara rutin. Tidak hanya terkait masalah pembukuan saja, pengurus Yayasan Kaki Kita Sukasada juga tidak pernah melaporkan secara tertulis penggunaan dana dari donatur, berdasarkan hal tersebut terindikasi adanya praktik akuntabilitas yang belum terlaksana dengan baik, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih mendalam, disamping permasalahan tersebut, penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan yayasan yang membentuk unit usaha belum pernah dilakukan.

Penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas dilakukan oleh Saputri (2020) dimana dalam penelitian tersebut akuntabilitas pengelolaan keuangan memuat nilai-nilai spiritual seperti nilai kejujuran, rasa adil dan tanggung jawab yang mempengaruhi adanya praktik akuntabilitas dalam lembaga yayasan. Penelitian terkait dengan praktik akuntabilitas pada lembaga sosial seperti yayasan juga dilakukan oleh Indyahrini (2019) dalam penelitiannya praktik akuntabilitas ditinjau dari berbagai dimensi, yang meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, organ yayasan yang meliputi ketua dan bendahara telah menyadari secara penuh pentingnya pembuatan laporan keuangan yayasan, walaupun tidak terlalu memahami mengenai pengetahuan akuntansi, namun bendahara yayasan telah berusaha dalam memperbaiki pencatatan keuangan yayasan. Penelitian yang dilakukan oleh Paranoan (2018) mengungkap praktik akuntabili-

tas pada lembaga nonlaba seperti pura tidak semata-mata harus disertai kelengkapan dokumen sebagai sumber data tetapi yang utama adalah prinsip keikhlasan dan kepercayaan kepada Sang Pencipta, dan prinsip karma menjadi benteng utama akuntabilitas.

Penelitian yang berkaitan dengan prinsip kemandirian pada lembaga sosial seperti yayasan dilakukan oleh Setyowati (2016) dimana dalam mewujudkan kemandirian lembaga sosial adalah dengan mendirikan unit-unit *entrepreneurship*. Hasil keuntungan dari unit-unit usaha tersebut, digunakan untuk memberikan gaji karyawan dan menutup biaya operasional yayasan serta mendukung jalannya program sosial yayasan yang meliputi, program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perekonomian, layanan sosial dan dakwah islam.

Dari uraian di atas peneliti berusaha mengungkap praktik akuntabilitas pengelolaan yayasan, akuntabilitas disini tidak hanya berfokus pada akuntabilitas laporan keuangan saja, namun juga akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan, mengingat Yayasan Kaki Kita Sukasada bukan hanya lembaga sosial yang menjalankan program sosial namun juga membentuk unit usaha dan pengelolaannya berbasis *social entrepreneurship*, peneliti juga ingin mengungkap bagaimana prinsip kemandirian yayasan dalam pengelolaan unit usahanya, dan mekanisme dari unit usaha untuk pendanaan kegiatan sosialnya dengan mengangkat judul: **“Mengungkap Praktik Akuntabilitas dan Prinsip Kemandirian pada Pengelolaan Yayasan Kaki Kita Sukasada Berbasis Konsep *Social Entrepreneurship* (Kewirausahaan Sosial)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat pemasukan dan pengeluaran yayasan yang tidak tercatat secara rinci dalam pembukuan yayasan.
2. Tidak adanya pelaporan secara tertulis penggunaan dana donasi kepada donatur.
3. Semakin minimnya sumbangan dari donatur menjadikan pengurus yayasan membentuk sumber dana mandiri dengan mendirikan unit usaha.
4. Ditemukannya rangkap jabatan, dimana pengurus yayasan juga terlibat aktif dalam menjalankan unit usaha yayasan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis membatasi permasalahan pada pengelolaan Yayasan Kaki Kita Sukasada berbasis konsep *social entrepreneurship* (kewirausahaan sosial), dimana hal ini mencakup pengelolaan dana publik (dari donatur), pelaksanaan tanggung jawab program yayasan, mekanisme keuntungan unit usaha yayasan untuk pendanaan kegiatan sosialnya.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas rumusan masalah yang penulis ajukan sebagai panduan dalam penelitian selanjutnya yaitu, bagaimana praktik akuntabilitas dan prinsip kemandirian pada pengelolaan Yayasan Kaki Kita Sukasada berbasis konsep *social entrepreneurship* (kewirausahaan sosial)?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik akuntabilitas dan prinsip kemandirian pada pengelolaan yayasan Kaki Kita Sukasda berbasis konsep *social entrepreneurship* (kewirausahaan sosial).

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bukan hanya dari penulis tetapi juga bagi pihak yang berkepentingan, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi hasil penelitian bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya mengenai praktik akuntabilitas dan prinsip kemandirian yang dilakukan oleh Yayasan Kaki Kita Sukasada dengan berbasis konsep *social entrepreneurship* (kewirausahaan sosial).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Yayasan Kaki Kita Sukasada

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga sebagai bahan masukan bagi pengelola Yayasan Kaki Kita Sukasada, sehingga kedepannya dapat menjalankan program yayasan dengan tetap memperhatikan praktik akuntabilitas dan prinsip kemandirian sehingga tidak adanya penyimpangan dalam pengelolaan yayasan dan pengelolaan yayasan yang tepat sangat diper-

lukan untuk memberikan kepercayaan yang lebih kepada donatur maupun masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai praktik akuntabilitas dan prinsip kemandirian dalam pengelolaan Yayasan Kaki Kita Sukasada dengan berbasis konsep *social entrepreneurship* (kewirausahaan sosial), sehingga bagi masyarakat yang sudah mendirikan atau ingin mendirikan organisasi sejenis (yayasan) dapat menjadikannya bahan pertimbangan untuk memperoleh sumber dana mandiri.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi jika tertarik dalam meneliti mengenai sistem pengelolaan yayasan yang berkaitan dengan praktik akuntabilitas dan prinsip kemandirian dalam pengelolaan yayasan berbasis konsep *social entrepreneurship* (kewirausahaan sosial).

